

Pesona Kearifan Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat

Fahmi Muhammad

Human Resource Development (HRD) Sahabat Beasiswa Jakarta

Email: kotakpesanfahmi@gmail.com

Abstract. *This article is about to review related to the form of management, public participation, and the impact of management of tourism potential in Pangandaran beach. This is based on the reason that Pangandaran beach has the potential of exotic tourism that is supported by other nature tourism. The method used in this study is descriptive qualitative. Sources of research data include the community of West Pangandaran Country, a government of Pangandaran Country, Tourism Office of Pangandaran Regional, and investors. The location of this research is West Citizens Association (Rukun Warga-RW) Pangandaran, Pangandaran Country, West Java. The method used in data collection in this research is by observation, documentation, and interview. The data obtained in this study were analyzed by reduced and presented in descriptive data display, then drawn a conclusion. The method used to obtain the validity of data using triangulation of sources, theories, and methods. In the management of this tourism potential, Pangandaran beach has a form of community-based tourism management or Community-Based Tourism (CBT). Where this form of management put forward the concept of harmony between stakeholders, i.e. community, government and private (investors). However, in the management of this community-based tourism, the role of local people is prioritized, because the main objective is the welfare of the local community through economic improvement by utilizing the existing potential. This community engagement process is so long that it creates the ideal form of CBT management.*

Keywords: *participation; tourism; destinantion management organitation.*

Abstrak. Artikel ini hendak mengkaji terkait dengan bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan dampak pengelolaan potensi pariwisata di Pantai Pangandaran. Hal ini dilandasi dengan alasan bahwa Pantai Pangandaran memiliki potensi pariwisata eksotik



yang diitujang dengan wisata alam lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Sumber data penelitian meliputi masyarakat Dusun Pangandaran Barat, pemerintah Desa Pangandaran, Dinas Pariwisata Kab. Pangandaran, dan para investor. Lokasi penelitian ini adalah Dusun Pangandaran Barat, Desa Pangandaran, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam pengeumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan direduksi dan disajikan dalam display data deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk memperoleh keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teori dan metode. Dalam pengelolaan potensi pariwisata ini, pantai Pangandaran mempunyai bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat atau Community Based Tourism (CBT). Di mana bentuk pengelolaan ini mengedepankan konsep keselarasan antara para stakeholder, yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta (investor). Namun dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini, peran masyarakat lokal lebih dikedepankan, sebab tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Proses pelibatan masyarakat ini sangat panjang sehingga menghasilkan bentuk pengelolaan CBT yang ideal.

Kata Kunci: partisipati; pariwisata; organisasi manajemen destinasi.

Pendahuluan

Dewasa ini pariwisata sudah menjadi trend baru dalam peningkatan ekonomi suatu negara. WTO¹ melihat bahwa prospek pariwisata ke depan semakin cerah dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 10,3 persen pada 2030. Namun ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan status sosial masyarakat, sebenarnya bukan fenomena baru. Menurut Spinllane, pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama.

¹ WTO atau World Tourism Organization, adalah organisasi internasional terkemuka di bidang pariwisata, yang mempromosikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang inklusif dan kelestarian lingkungan dan menawarkan kepemimpinan dan dukungan kepada sektor dalam memajukan kebijakan pengetahuan dan pariwisata di seluruh dunia. Markas besarnya berada di Madrid, Spanyol. Lembaga ini membuat Peringkat Pariwisata Dunia di setiap negara-bangsa.

Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat.²

Dalam meningkatkan ekonomi aspek pariwisata ini, sudah saatnya masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Hal ini masyarakat dapat dijadikan *partnership* oleh pemerintah dalam menjalankan aspek manajemen. Dengan menjalankan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, tentunya seperti yang dikembangkan tidak merusak kearifan lokal. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Kepariwisataaan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataaan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.³

Salah satu kawasan di Indonesia yang mengembangkan *tourism partnership* ini adalah pantai Pangandaran. Pantai ini merupakan salah satu obyek wisata andalan yang ada di Jawa Barat.⁴ Daerahnya yang terletak di selatan pesisir Jawa, menjadi salah satu obyek wisata unggulan di daerah tersebut. Selain hanya menikmati pemandangan pantai yang indah, pasir putih terhampar luas, pantai ini juga dijadikan cagar alam yang kaya akan flora dan fauna. Obyek wisata pantai ini ditunjang dengan warisan budaya dan sejarah, seperti adanya tradisi hajat laut. Hajat laut adalah tradisi syukuran nelayan setelah setahun penuh di beri rezeki dan keselamatan selama melaut. Wisata budaya ini mengundang banyak wisatawan domestik maupun asing untuk hadir di Pangandaran. Kemudian peninggalan sejarah yaitu Gua Jepang, Benteng Belanda dan peninggalan sejarah lainnya. Dengan keunggulan yang dimiliki, tidak membuat wisatawan bosan yang hanya melihat pemandangan seperti kebanyakan pantai lainnya.

Destinasi yang kaya ini, dalam proses pengembangan kawasan pantai, Pangandaran tidak hanya menyuguhkan wisata melalui potensi alam yang ada. Namun pihak swasta juga berperan dalam menyuguhkan pariwisata lain, seperti adanya pembangunan *Waterpark*,

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 41.

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

⁴ [Internet], diunduh dalam www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=7&lang=. Diakses 18/09/2014.

yang mana dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat setempat. Misalkan menjadi satpam, penjaga karcis, membuka warung, dan pengawas kolam renang.

Dengan sentuhan pariwisata modern ini, telah memberikan kontribusi positif ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam catatan, di tahun 2014 sebesar Rp. 2.380.237.000, di tahun 2015 kontribusi ke dalam PAD sebesar Rp. 2.750.000.000.⁵ Walaupun tidak sesuai target, namun angka pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan pariwisata sangat fantastis sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pengelolaan potensi pariwisata Pantai Pangandaran yang baik oleh pemerintah, swasta (*investor*), dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi dan status sosial masyarakat sehingga berdampak baik terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tidak merusak kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah pantai.

Adanya kearifan lokal dalam sistem pengelolaan, hal ini dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan hasil riset dari Mariena Dewi tentang "*Analisis Strategi Pemasaran Pengelola Pariwisata Pantai Pangandaran Pasca Tsunami, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat*".⁶ Karya ini membahas potensi wisata bahari pasca tsunami, yang mana tulisan ini memberikan rekomendasi akibat kurangnya sentuhan lokal dan intervensi pemerintah dalam pengelolaan, berdampak pada semakin menurunnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2006. Hal ini disebabkan langsung oleh adanya trauma bagi wisatawan untuk datang ke Pantai pangandaran. Selain itu, Muhammad Abdul Haris, meneliti tentang "*Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Berbasis Android*".⁷ Hasil riset ini menunjukkan bahwa pariwisata melalui sistem informasi akan memudahkan masyarakat mencapai tujuan atau lokasi wisata. Dengan memudahkan para pengunjung, maka secara tidak langsung dapat menambah daya tarik yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Testimoni kajian dari dua hasil riset di atas, diperkuat dengan

⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/node/310977>. [Internet] Diakses 4/03/2015.

⁶ Mariena Dewi, "*Analisis Strategi Pemasaran pengelola Pariwisata Pantai Pangandaran Pasca Tsunami*", (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2008).

⁷ Muhammad Abdul Haris, "*Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Berbasis Android*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

teori yang menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur *stakeholder* termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini untuk mendorong terbentuknya kemitraan diantara pihak *stakeholder* terkait tersebut. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diarahkan untuk mengurangi tekanan terhadap obyek dan daya tarik wisata sehingga pembangunan pariwisata dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini masyarakat setempat harus disadarkan atas potensi yang dimiliki sehingga mereka mempunyai rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) terhadap aneka sumber daya alam dan budaya sebagai aset pembangunan pariwisata.⁸

Comunity based tourism merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. *Comunity based tourism* bukanlah bisnis pariwisata yang bertujuan hanya untuk memaksimalkan profit atau keuntungan bagi para investor. *Comunity based tourism* lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat setempat dan sumber daya lingkungan (*environmental resources*).⁹

Dari perpaduan teori dan praktik di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana bentuk pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan dampak pengelolaan potensi pariwisata di Pantai Pangandaran. Dengan harapan, hasil kajian ini diharapkan menjadi referensi pengelola pariwisata di daerah Pantai Pangandaran sebagai media pengembangan perekonomian masyarakat dan masyarakat mengetahui pola pengelolaan pariwisata yang baik sehingga tidak meminggirkan masyarakat.

Secara umum, kajian ini merupakan pengembangan riset melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh informasi yang akurat dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan potensi pariwisata Pantai Pangandaran, penulis menentukan informan dari *stakeholder* terkait, yang terdiri dari pemerintah setempat atau lembaga yang terkait, masyarakat Pantai Pangandaran, swasta

⁸ Muhammad Abdul Haris, hal. 20-21.

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan*, hal. 71.

(*inestor*) dan pengunjung Pantai Pangandaran. Dalam kajian ini penulis menentukan informan dengan teknik *purposive*, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal Pantai Pangandaran, sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang proses pengelolaan, keterlibatan masyarakat dan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya penulis menentukan teknik validasi data, adapun yang dipilih adalah teknik triangulasi. Pemilihan teknik ini dalam rangka melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang di dapat dengan metode interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di wawancara.

Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Pangandaran

Pantai Pangandaran merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, bahkan pantai ini juga merupakan objek wisata andalan Propinsi Jawa Barat. Ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain pantai juga ada wisata sejarah, wisata budaya, wisata bahari, wisata air, dan taman wisata alam. Berikut penuturan Kuswanto saat dikonfirmasi kebenarannya:

“Pangandaran bukan hanya hutan dan pantai justru, banyak wisata lain di Pangandaran yang harus dilihat, Pertama kearifan lokal, yang kedua wisata desa karena hutan dan pantainya sudah tidak perlu dijual atau dipromosikan dengan gencar.”¹⁰

Potensi yang dimiliki pantai Pangandaran sangat beragam sehingga tidak membuat wisatawan jenuh. Di kawasan pantai, para pengunjung dapat menikmati wisata penunjang lain sehingga dapat melakukan kegiatan yang menyenangkan. Melihat alam yang begitu eksotis, masyarakat setempat perlu membuat sebuah tindakan nyata, yakni pengembangan pengelolaan kawasan pantai dengan bentuk dan konsep yang serius.

Bentuk eksotisme alam di pantai Pangandaran ini misalnya, ragam kuliner, budaya, wisata alam, wisata buatan, dan lainnya. Bahkan Pangandaran masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional di Indonesia. Selain itu, Organisasi PBB (*Perserikatan Bangsa-Bangsa*) yang

¹⁰ Kusnanto, Wawancara, 6 April 2015.

konsen dalam bidang pariwisata yaitu UN-WTO (*United Nation- World Tourism Organisation*) sangat tertarik untuk menyelamatkan kawasan pantai dengan melihat potensi yang perlu dikembangkan. Ketertarikan WTO ini diantaranya pengembangan kawasan sebagai pusat keanekaragaman hayati sehingga perlu di konservasi ulang semenjak terjadinya tsunami tahun 2006. Selain itu, menurut masyarakat dengan kunjungan yang dilakukan oleh UN-WTO ke Pangandaran, sebagai sebuah wujud anugerah, karena program UN-WTO ini juga sebagai pendorong atau motivasi mekarnya Kabupaten Pangandaran.

Potensi yang ada harus dilestarikan agar tidak mengalami kepunahan, dan yang lebih besar dari kondisi alam yang ada adalah dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar, sehingga harapannya hidup sejahtera. Tumbuh kembangnya suatu objek wisata, tergantung pada mekanisme pengelolaan yang baik, tidak hanya bergantung modal belaka. Dengan begitu, bentuk pengelolaan yang dikembangkan di kawasan ini melalui pengelolaan berbasis masyarakat, yang mengedepankan konsep keselarasan antara *stakeholder* terkait— pemerintah, swasta dan masyarakat. Bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini sangat efektif diterapkan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan keberlanjutan.

“CBT (Community based tourism) di Pangandaran sudah dikerjakan dari tahun 2007 berbasis komunitas masyarakat, tetapi sinkronisasi dengan pemerintah semasa jamannya Ciamis. Terjalin tahun 2009, 2010, kemudian 2011 akhir terputus. Terputus artinya tidak optimal jangan dibilang tidak ada tapi tidak optimal, bagaimana pemerintah memperhatikan *community based tourism* yang melahirkan DOB (Daerah Otonom Baru) Pangandaran. Respon dari publik bagus, Bupati mendukung terhadap CBT, makanya lahir FTKP (Forum Tata Kelola Pariwisata). FTKP ini adalah forum lembaga pengelola pariwisata, siapa yang duduk disana? Yang duduk disana pemerintah, swasta (*investor*), dan masyarakat.”¹¹

Sejalan dengan itu, stakeholder yang mementingkan golongannya walaupun mereka sudah memiliki program masing-masing, tetapi antara stakeholder terkait harus selaras, bisa bermusyawarah untuk saling memberikan masukan sehingga dari hasil musyawarah tersebut memantapkan satu program yang dijalankan. Dalam posisi ini tugas pemerintah sebagai pemangku kebijakan penting mengeluarkan statemen bersama untuk membangun masyarakat. Mengingat perlu

¹¹ Kusnanto, Wawancara, 6 April 2015.

menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan sebagai modal untuk peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ini dikembangkan dengan potensi wisata alam. Berbeda dengan wisata buatan, wisata buatan itu adalah wisata yang murni dibuat oleh swasta (*investor*), dan dikelola oleh swasta untuk keuntungan pribadi atau perusahaan. Pembuatan wisata buatan juga memang ada partisipasi masyarakat, tapi hanya sedikit keterlibatannya, di sana swasta sangat mendominasi dan keuntungan bagi masyarakat sangat sedikit.

Masyarakat pantai Pangandaran cukup menyadari akan hal ini, sehingga mereka mau terlibat langsung menjadi stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan inilah yang menjadi dasar bahwa Pangandaran menggunakan bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Model bentuk pengelolaan partisipasi masyarakat yang ada di Pangandaran salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan program. Keterlibatan berbagai pihak dalam penataan di kawasan wisata pantai sangatlah penting, hal ini menjadi kekuatan tersendiri untuk bisa mengajak masyarakat bersama-sama melaksanakan penataan. Maka kawasan wisata pantai Pangandaran ada yang disebut dengan *Destination Management Organisation* (DMO). DMO adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa lembaga yang peduli terhadap Pengelolaan pariwisata Pantai Pangandaran. Asosiasi ini terdiri dari; (1) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Cabang Kabupaten Pangandaran; (2) Forum Badan Perwakilan Desa Pangandaran; Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia; (3) Komunitas Pengembang Pariwisata; (4) Himpunan Pramuwisata Indonesia; (5) Pokja Pariwisata Pangandaran; (6) Tokoh Sosial Budaya; (7) Tokoh masyarakat; (8) Forum Nelayan; (9) Balawisata; dan (10) Presidium.

Adanya perwakilan dari berbagai pihak serta koordinasi lintas sektor menjadikan DMO bisa belajar untuk menyelesaikan beberapa masalah secara bersama-sama. Walaupun pada awalnya masyarakat Pangandaran menilai bahwa DMO adalah organisasi yang sama seperti organisasi lain yang berorientasi sesaat saja karena adanya pengalaman dengan berbagai program di Pangandaran tetapi tidak memberikan perubahan yang berarti, membuat masyarakat Pangandaran tidak puas. Namun lambat laun kepercayaan masyarakat Pangandaran mulai terbangun kembali melalui kegiatan-kegiatan yang diwadahi oleh DMO. Program ini dalam pelaksanaannya memang tidak semudah membalikan telapak tangan, karena membutuhkan keseragaman pemahaman.

Dari terbentuknya organisasi DMO ini langkah demi langkah telah di tempuh yang menghasilkan beberapa program untuk pengelolaan pariwisata ke arah yang lebih baik. Langkah *pertama* Koordinasi dengan pemangku kepentingan, *kedua* menyusun strategi dan rencana kerja dengan identifikasi pelaksana, waktu, bentuk kontribusi masing-masing pihak yang berbeda, penyusunan program, dan implementasi, *ketiga* peningkatan kapasitas: masyarakat, pelaku dan pemerintah. Dan *keempat* mengajak banyak pihak terlibat.

Dari langkah yang telah ditempuh akhirnya menghasilkan beberapa program untuk menyelesaikan permasalahan maupun rancangan strategis dalam pengelolaan pariwisata pantai Pangandaran, yaitu: (1) penataan kawasan untuk periode khusus (Musim puncak)—pengelolaan sampah dan tata informasi untuk wisatawan di musim puncak, penataan pedagang, dan sterilisasi jalur rawan macet oleh MUSPIKA (Pihak Kecamatan, Kapolsek, dan Danramil); (2) pengembangan produk dan pemasaran destinasi—dengan pembuatan produk dan pemasaran (media promosi) meningkatkan minat bagi wisatawan.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat menjadi harapan bersama sehingga tidak terlalu menjadi andalan perekonomian. Dalam aplikasinya, masyarakat masih tetap bisa menjadi petani dan nelayan sebagai mata pencaharian. Namun dengan seiring berkembangnya jaman, wisatawan domestik maupun mancanegara banyak yang datang ke pantai Pangandaran sehingga banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai menjadi mata pencaharian utama. Dalam rangka meningkatkan pencaharian masyarakat tersebut, stakeholder terkait menjamin keberlangsungan pembangunan dengan mekanisme manajemen pemasaran dalam pengelolaan pariwisata. Salah satunya aplikasi Tourism Information Center (TIC), sebagai lembaga yang dibuat untuk mempromosikan pariwisata Pangadaran agar wisatawan dapat dengan mudah mencari informasi tentang kawasan wisata.

Dengan begitu, bentuk pengelolaan pariwisata terbagi menjadi dua; pertama, bentuk pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) adalah bentuk pengelolaan pariwisata yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dari pengembangan pariwisata, masyarakat berperan penuh sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau maupun evaluator. Namun masyarakat juga tidak dapat menjalankan ini sendirian oleh karena itu bentuk pengelolaan model ini mengedepankan konsep keselarasan dan keseimbangan

antara para *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kedua, bentuk pengelolaan pariwisata *top down* adalah bentuk pengelolaan pariwisata yang kebijakannya langsung dari pusat tanpa berkoordinasi dengan para *stakeholder*, posisi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam kebijakan ini adalah sebagai objek. Posisi kedua ini adalah dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan potensi pariwisata. Masyarakat selalu dilibatkan dalam segala kegiatan pengelolaan pariwisata, baik itu sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau maupun evaluator kemudian hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah setempat yang membidangi pariwisata cukup selaras dalam pengelolaan pariwisata seperti contoh dengan adanya program *Destination Management Organisation* (DMO) didalam DMO ada sebelas pemangku kepentingan atau *stakeholder* termasuk didalamnya adalah masyarakat, pemerintah dan swasta.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Wisata

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting keberhasilan sebuah program. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat, namun bila dalam perumusannya tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit berpihak kepada rakyat. Maka partisipasi ini harus melibatkan semua unsur dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Partisipasi masyarakat juga sangat berkaitan erat dengan pengelolaan potensi pariwisata berbasis masyarakat. Oleh karena itu, seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi pariwisata di Pantai Pangandaran. Mari kita lihat.

Sejak kawasan pantai menggunakan konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat, secara otomatis partisipasi masyarakat dalam konsep ini sangat kuat, karena model utamanya adalah keterlibatan masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Kuswanto berikut ini.

“Nah sekarang jika Anda bertanya, apakah di Pangandaran ada partisipasi masyarakat? Jawabannya ada, karena UN-WTO sudah turun ke Pangandaran dari tahun 2007 pasca tsunami, yang berakhir di tahun 2010. Dan dilanjutkan lagi oleh program

destination management organisation sampai dengan tahun 2014. Pada gilirannya, perencanaanya sampai tahun 2019, semua itu bentuknya bukan *top down* tapi berbentuk *community based tourism* atau partisipasi masyarakat".¹²

Bentuk partisipasi yang dikembangkan, yakni pertama yang sifatnya program, sebuah program biasanya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan juga memerlukan ahli waris. Misalkan masyarakat tidak dilibatkan dalam sebuah program maka yang menjalankan sebuah program itu tidak akan bisa melanjutkan program tersebut. Kedua, kegiatan yang sifatnya proyek masyarakat tidak dilibatkan secara penuh. Masyarakat hanya menjadi pelaksana teknis lapangan. Dalam kegiatan proyek ini, keterlibatan masyarakat sangat sedikit karena dalam tahap pembangunan semuanya terpusat mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan hingga pengelolaan tanpa harus meminta bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat setempat harus bisa memilih dan memilah mana yang sifatnya program dan mana yang sifatnya proyek agar proses pembangunan pariwisata yang ada terus berkembang dan berkelanjutan.

Partisipasi yang dipahami oleh masyarakat sangat luas, tidak hanya yang bersifat sebatas ikut serta secara fisik, tetapi dalam berbagai sektor yang kaitannya untuk pengelolaan pariwisata. Pemahaman ini sangat cocok, karena masyarakat dapat terlibat secara menyeluruh. Seperti contoh berikut ini keterlibatan masyarakat pantai Pangandaran dalam pengelolaan potensi Pariwisata, antara lain: (1) masyarakat dilibatkan dalam merumuskan program—masyarakat selalu diajak dalam merumuskan program yang akan dilaksanakan yang terkait dengan pengelolaan potensi pariwisata Pantai Pangandaran; (2) masyarakat dilibatkan dalam menjaga keamanan—dalam proses menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Pantai Pangandaran, masyarakat selalu dilibatkan dengan kerjasama dengan petugas keamanan negara (Polisi), seperti menjaga kalau ada even-even besar yang diadakan; (3) masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan; (4) masyarakat lokal banyak yang menjadi pedagang—dengan banyaknya pengunjung yang berwisata ke Pantai Pangandaran secara otomatis masyarakat banyak memanfaatkan *moment* tersebut untuk berdagang atau berjualan; dan (5) masyarakat lokal banyak yang mempunyai penginapan (*homestay*, kos dan hotel).

¹² Kuswanto, Wawancara, 6 April 2015.

Penerapan konsep Partisipasi masyarakat dengan *community based tourism* dalam pengelolaan potensi pariwisata tentu sangat luar biasahasilnyapertamakeinginanpembangunanberawal darimasyarakat yang, *kedua* tidak akan pernah ada komplain dari masyarakat namun yang terpenting dalam partisipasi masyarakat adalah terciptanya rasa memiliki yang tinggi. Seperti ada kasus premanisasi dalam retribusi atau pungutan liar yang dilakukan preman, masyarakat ikut turun tangan mengamankan premanisasi tersebut.

Implikasi Pengelolaan Wisata Berbasis: *Destination Management Organisation*

Dampak dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Masyarakat Pangandaran, seperti wilayah pesisir umumnya, awalnya mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber perekonomian. Perairan yang mengelilingi Pangandaran merupakan tujuan nelayan dalam mencari hasil laut, sehingga perikanan pun menjadi tumpuan perekonomian. Namun seiring berkembangnya waktu mata pencaharian masyarakat menjadi beragam seperti dalam tabel berikut:

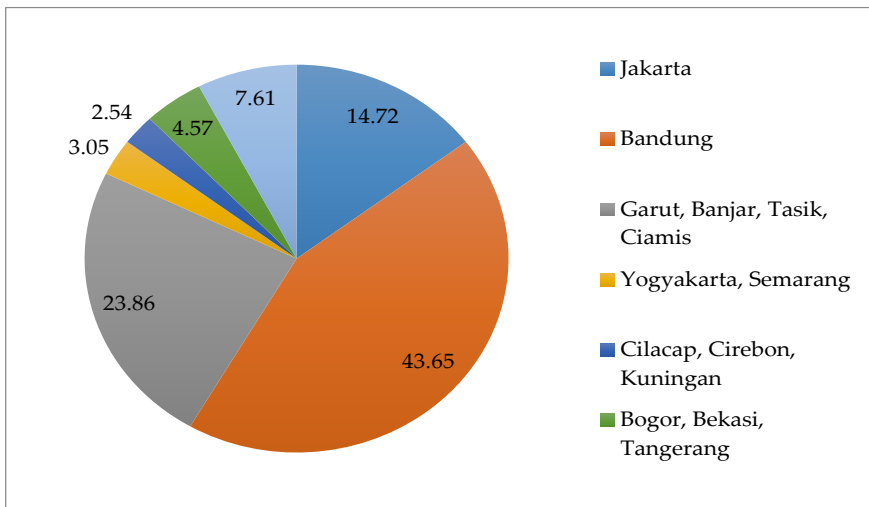
Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Kawasan Pantai Pangandaran

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai/Karyawan	769
2.	Wiraswasta/Pedagang	1.103
3.	Tani	123
4.	Pertukangan	37
5.	Buruh Tani	192
6.	Pensiunan	50
7.	Nelayan	1.874
8.	Jasa	1.217
9.	Pedagang Wisata	537
10.	Becak	37
11.	Perahu Pesiar	72
12.	Bugie/Ban	34
13.	Bengkel	27
Total		6.072

Sumber: *Dokumen Desa Pangandaran, 2012.*

Data yang tersaji di atas, adalah kondisi pencaharian masyarakat sekitar kawasan pantai Pangandaran setelah adanya program DMO. Di mana masyarakat bekerja menjadi pedagang di kawasan wisata pantai. Selain itu, alasan lain mengapa masyarakat memilih menjadi pedagang, karena data pengunjung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan—baik pengunjung domestik maupun mancanegara. Berikut data yang tersaji tentang pengunjung ke kawasan wisata pantai.

Gambar 1. Data Wisatawan Domestik



Sumber: *Disparperindagkop UMKM Kab. Pangandaran, 2013.*

Dengan ada banyak wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata ini, maka masyarakat beralih profesi yang tentunya dapat menunjang perekonomian mereka. Berdasarkan fakta di lapangan, berikut beberapa profesi yang dijalankan oleh masyarakat, antara lain; (1) pemandu wisata (*tour guide*); (2) pengadaan hotel, *homestay* dan kos-kosan—seiring menjamurnya wisatawan yang datang dari berbagai Kota ke Pantai Pangandaran dari berbagai daerah bahkan dari mancanegara tentunya mereka tinggal beberapa hari di Pangandaran dan membutuhkan tempat tinggal. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat Pangandaran sebagai lahan ekonomi; (3) membuka warung dan toko—dengan banyaknya wisatawan yang datang dan kebutuhan yang cukup berpariasi baik kebutuhan primer, sekunder

dan tersier. Karena mereka cukup lama tinggal di Pangandaran, masyarakat sekitar memanfaatkan itu untuk menambah pendapatan dengan mendirikan warung makan, warung kopi, toko kelontong, souvenir, dan lain-lain; (4) membuka penyewaan sepeda ontel dan motor—transportasi juga menjadi kebutuhan bagi wisatawan yang berada di Pangandaran untuk hanya sekedar berkeliling di sekitar Pangandaran. Untuk menyewa ontel harga kisaran 20 ribu perjam, sedangkan untuk sepeda motor 12 jam dengan harga 40 ribu dan 24 jam harganya 70 ribu dengan jaminan KTP, SIM dan Paspor; (5) menjadi pegawai atau karyawan—dengan menjamurnya pembangunan di Pantai Pangandaran masyarakat banyak yang menjadi pegawai semisal pegawai hotel, restoran, menjaga toko, bahkan masyarakat sebagian ada yang masuk kedalam wilayah birokrasi yang membidangi pariwisata.

Dampak dalam Aspek Sosial dan Budaya. Pantai Pangandaran adalah pariwisata yang cukup terkenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayati lautnya, sehingga banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Wilayah pantai juga memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dengan keunikan pola hidup lengkap dengan produk budaya masyarakat lokal. Namun seiring berkembangnya waktu, Pangandaran sebagai kawasan destinasi pariwisata favorit mengakibatkan dampak sosial dan kebudayaan lokal semakin terkikis karena setiap orang yang datang ke Pangandaran bebas membawa budaya masing-masing sesuai dari tempat mereka berasal. Banyak akulturasi budaya yang lahir di Pangandaran sebagai hasil atau efek dari pariwisata sehingga memarjinalkan budaya lokal yang semakin lama semakin menjauh.

“Degradasi budaya di Pangandaran sudah hampir parah, karena budaya lokal semakin lama semakin terpinggirkan, makanya kita ada yang namanya program revitalisasi kebudayaan untuk pencegahan marjinalisasi”.¹³

Sementara itu, dampak sosial dari adanya pariwisata pantai Pangandaran sangat kuat sehingga dapat mendobrak kearifan lokal yang ada di masyarakat. Hal ini harus menjadi masalah bersama dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata dan mampu mengikis kebudayaan negatif dari luar. Namun tidak sepenuhnya kebudayaan yang dari luar itu negatif, banyak juga yang positif seperti dalam pernikahan yang dilakukan antara orang

¹³ Kuswanot, Wawancara, 6 April 2015..

mancanegara dan orang lokal.

“Dengan datangnya wisatawan ke Pangandaran banyak juga dampak positifnya, masyarakat lokal yang badanya kecil-kecil hidungnya pesek-pesek banyak yang nikah sama orang bule, itu kan memperbaiki keturunan nanti anaknya jadi tinggi-tinggi dan mancung-mancung”.¹⁴

Maka dari itu, adanya kegiatan pariwisata ini harus menjadi sarana komunikasi antar masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah, bahkan dengan wisatawan mancanegara. Di sinilah masyarakat dapat belajar bahasa yang berbeda-beda dan masyarakat dapat belajar kebudayaan yang ada di luar daerah dan luar negeri.

Dampak dalam Aspek Lingkungan. Dalam aspek lingkungan, tentunya berdampak negatif karena dengan berkembangnya pariwisata menjadikan kawasan ini menjadi daerah industri apalagi dengan banyaknya *investor* yang datang dari berbagai daerah bahkan dari mancanegara. Dampak pembangunan pariwisata tersebut menyebabkan beberapa permasalahan serius diantaranya; (1) air—menjamurnya pembangunan hotel berbintang dengan fasilitas kolam renang besar mengakibatkan cadangan sumber air tanah yang ada di kawasan pariwisata semakin menipis. Selain itu, bisnis *laundry* ada banyak yang menggunakan bahan kimia, sehingga mengakibatkan pencemaran air yang cukup berbahaya bagi kesehatan masyarakat; (2) polusi udara—berbagai jenis kendaraan seperti kendaraan bermotor, mobil, bahkan pesawat yang mengakibatkan kemacetan yang tidak tertahankan apalagi saat masa liburan tiba, dengan semakin ramainya pengunjung maka polusi udara yang ada di kawasan pantai semakin parah; (3) kerusakan pantai—terjadi karena banyaknya wisatawan yang membuang sampah sembarangan di Pantai, bahkan bukan tidak mungkin dalam sampah tersebut mengandung zat kimia yang akan merusak aneka biota laut; (4) penebangan pohon ilegal; (5) rawan punah satwa liar—wisata alam yang menjadi kawasan konservasi satwa langka, satwa-satwa tersebut sering keluar ke kawasan dan mencari makan bahkan mereka memakan sampah padahal di kawasan cagar alam kebutuhan makan mereka sudah tercukupi; (6) pengrusakan situs sejarah—dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung dan tidak terkontrol karena jumlah petugas tidak sesuai dengan wisatawan yang datang, banyak terjadi pengrusakan-pengrusakan fisik terhadap

¹⁴ Iwan, Wawancara, 11 April 2015.

situs-situs seperti *vandalisme* dan menginjak-nginjak situs sejarah; (7) tata ruang yang tidak kondusif—menjamurnya para pedagang yang tidak terkontrol mengakibatkan tata ruang yang kacau, para pedagang tersebut membuka lapak dikawasan pantai sehingga mengganggu keindahan pantai, pembuangan sampah sembarangan, dan bahkan dapat mengakibatkan abrasi karena lahan pinggir pantai yang harusnya ditanami tumbuh-tumbuhan ternyata ditanami tiang-tiang warung para pedagang.

Dampak dalam Aspek Pembangunan. Dengan adanya pariwisata suatu daerah dapat berkembang secara fisik meliputi infrastruktur jalan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan banyak infrastruktur lainnya. Kemudian PAD yang dihasilkan dari pariwisata tersebut dapat didistribusikan untuk pembangunan daerah-daerah tertinggal di Kabupaten Pangandaran. Inilah yang sudah dijalankan oleh pemerintah daerah. Stakeholder terkait komitmen untuk melakukan pembangunan di kawasan yang tertinggal, sehingga tingkat kesejahteraan bisa terwujud dengan baik.

Penutup

Pantai Pangandaran memiliki potensi pariwisata alam yang sangat menarik untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki cukup beragam mulai dari taman wisata alam, pantai, wisata desa, wisata budaya, wisata sejarah, wisata kuliner, dan banyak wisata lainnya. Selain itu, para wisatawan dapat melakukan berbagai kegiatan menarik di kawasan wisata Pangandaran seperti bersepeda, trekking, kuliner, berselancar, berbelanja, memancing, potografi, dan snorkeling.

Potensi yang dimiliki ini harus dikelola dengan konsep pengelolaan yang baik agar keberlangsungannya tetap terjaga mengingat sumberdaya alam semakin lama akan semakin habis dan tidak dapat diperbaharui. Kondisi ini perlu dikendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumberdaya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran. Dengan sumberdaya alam yang melimpah ini harus bermanfaat bagi masyarakat dan mencapai sasaran tidak hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja, dari hasil pengelolaan pariwisata kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari pengelolaan pariwisata tersebut.

Pantai Pangandaran sudah sejak lama menggunakan konsep pariwisata berbasis masyarakat, yaitu masyarakat berperan penuh

sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, pemantau maupun evaluator dalam pengelolaan pariwisata. Konsep ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa keselarasan antara pemerintah dan swasta. Maka dari itu yang disebut *stakeholder* dalam konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah masyarakat, pemerintah dan swasta. Pelibatan masyarakat dalam sebuah pengelolaan pariwisata merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, masyarakat adalah elemen dari pembangunan itu sendiri. Seperti dalam pengelolaan potensi pariwisata di pantai Pangandaran, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena yang mengetahui sepenuhnya tentang informasi, kondisi lapangan, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan pariwisata di Pantai Pangandaran mempunyai serangkaian dampak positif maupun negatif. Dampak yang dirasakan hasil dari pengelolaan pariwisata yang ada di Pantai Pangandaran. *Pertama*, masyarakat Pangandaran dalam segi ekonomi dengan adanya pengelolaan pariwisata ini masyarakat mempunyai ladang ekonomi baru selain melaut dan bercocok tanam, masyarakat dapat berdagang, menjadi pemandu wisata, membuka penyewaan berenang, menjadi pegawai bahkan memiliki hotel.

Namun dalam aspek sosial budaya yang terjadi sangat kental akibat berkembangnya pariwisata pantai Pangandaran dan banyaknya wisatawan yang datang dari luar daerah maupun mancanegara dari situ banyak akulturasi yang terjadi. Masyarakat Pangandaran banyak yang meninggalkan budaya lokal terutama anak-anak remaja. Sementara dampak lingkungan adalah permasalahan yang sangat serius yang harus disadari bersama oleh masyarakat. Karena dampak ini bisa meniadakan pariwisata yang ada. Serangkaian dampak negatif banyak terjadi, seperti berkurangnya cadangan air, polusi udara, pencemaran pantai, penebangan pohon, terganggunya kehidupan satwa liar dan merusakkan situs sejarah.

Dengan begitu, perlu kita sadari bersama bahwa pariwisata pantai Pangandaran merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga bersama kelangsungannya. Karena dari pariwisata ini dapat kita ketahui manfaat yang begitu besar akan didapatkan bagi masyarakat, pemerintah, maupun *investor (stakeholder)*. Untuk itu, bagi para *stakeholder* supaya tidak melihat pariwisata berdampak terhadap ekonomi saja. Namun harus mementingkan serangkaian akibat negatif lainnya. Dalam posisi ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan

harus memperketat regulasi bagi para *investor* dan membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha guna mencapai perekonomian masyarakat yang stabil. Dengan banyaknya wisatawan yang datang dari luar daerah dan mancanegara akan berdampak pada perubahan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, maka masyarakat harus bisa mempertahankan budaya lokal yang ada atau masyarakat harus cerdas memilah dan memilih budaya mana yang harus ditiru untuk dikembangkan.

Daftar Pustaka

- [Internet] <http://www.pikiran-rakyat.com/node/310977>. Diakses 4/03/2015.
- [Internet], diunduh dalam www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest-det.php?id=7&lang=. Diakses 18/09/2014.
- Dewi, M. (2008). "Analisis Strategi Pemasaran pengelola Pariwisata Pantai Pangandaran Pasca Tsunami". Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Abdul, H. M. (2013). "Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Kulon Progo Berbasis Android". Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sakti, H. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Wawancara

- Iwan. (2015).
- Kusnanto. (2015).
- Kuswanto. (2015)

